



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 72. Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km² (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta – Jawa.

a. Letak Wilayah

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06° 30' 58" Lintang Selatan sampai dengan 07° 00'24" Lintang Selatan dan diantara 108° 19'30" Bujur Timur sampai dengan 108° 50'03" Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Prov. Jawa Tengah)

b. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006, Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 40 Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan.

B. Gambaran Umum Demografis

Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 berpenduduk 2.437.899 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.236.316 jiwa, penduduk perempuan 1.201.583 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2023). Pada Tahun 2023, Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 103.136 jiwa dan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 29.310 jiwa.



II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Pencapaian kinerja makro Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

No	Indikator kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,92	71,81	0,89
2	Angka Kemiskinan	12,01	11,20	-0,81
3	Angka Pengangguran	8,11	7,65	-0,46
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,09	4,85	0,76
5	Pendapatan Per kapita (Juta Rp)	24,47	25,97	1,5
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,355	0,361	-0,006

III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial dan ketentraman dan ketertiban, Capaian kinerja Urusan Pelayanan Dasar Merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Adapun capaian pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Tahun 2023, sebagai berikut :

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99,218%	Dinas Pendidikan	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,105%	Dinas Pendidikan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,295%	Dinas Pendidikan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	77,604%	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,142%	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,185%	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97,241%	Dinas Kesehatan	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,788%	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,661%	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	58,783%	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,341%	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,312%	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,197%	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	91,421%	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,151%	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,349%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Dinas PUTR	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan	0%	Dinas PUTR	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	19,937%	Dinas PUTR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	92,959%	Dinas PUTR	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,420%	Dinas PUTR	
		6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100%	Dinas PUTR	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	84,563%	Dinas PUTR	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	83,921%	Dinas PUTR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUTR	
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	13,135%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,256%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	8,828%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (2.464 Orang)	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (2.464 Orang)	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100% (134.687 Orang)	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	89,937%	Dinas Damkar dan Penyelamatan	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11 Menit	Dinas Damkar dan Penyelamatan	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinas Sosial	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Disnaker	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	37,692%	Disnaker	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	33.826.875,816 Rupiah	Disnaker	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1,846%	Disnaker	
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	70,281%	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung	0,397%	DPPKBP3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi	100%	DPPKBP3A	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,490%	DPPKBP3A	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang selesai tepat waktu	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	56,96%	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	11,539%	Dinas Lingkungan Hidup	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	47,869%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	98,787%	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	27,834%	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	94,647%	Disdukcapil	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12,903%	Disdukcapil	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	DPMD	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1,020%	DPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,19	DPPKBP3A	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	85,029%	DPPKBP3A	
		3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,971%	DPPKBP3A	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,63%	Dishub	
		2	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,25 V/C	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	89,474%	Diskominfo	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,842%	Diskominfo	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	39,672%	Dinkop dan UKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,274%	Dinkop dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-0,883%	DPMPSTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,378%	Dispora	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,770%	Dispora	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	0	Dispora	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	Diskominfo	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	44,961%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00%	Disbudpar	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tidak ada Survey pada Tahun 2023
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7,1164	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	70,901%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	83,33%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	110,787% (96.660,63 Ton)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	57,535%	Disbudpar	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	40,687%	Disbudpar	
		3	Tingkat hunian akomodasi	65,783%	Disbudpar	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,390%	Disbudpar	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,313%	Disbudpar	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	622,854%	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-37,023%	Dinas Pertanian	
28	Kehutanan		-	100%	Bukan Kewenangan Kab/Kota	
29	Energi dan Sumber Daya mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	Bukan Kewenangan Kab/Kota	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Disdagin	
		2	Persentase kinerja realisasi	52,815%	Disdagin	
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	67,449%	Disdagin	
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di	1,558%	Disdagin	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%	Disdagin	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi	0,392%	Disdagin	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh	0%	Disdagin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	0%	Disdagin	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%	Disdagin	
32	Transmigrasi		-	100%	Bukan Kewenangan Kab/Kota	
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	3,661%	BKAD	
		2	Rasio PAD	18,533%	BKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	69,588%	BKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	BKAD	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian Barjas Setda	
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	19,273%	Bagian Barjas Setda	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	10,947%	Bagian Barjas Setda	
		4	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-506,168%	Bagian Barjas Setda	
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,430%	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,466%	BKPSDM	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55,519%	BKPSDM	
36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	15,429%	BKAD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8,183%	BKAD	
		3	Assets Management	100%	BKAD	
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,463%	BKAD	
37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	92,199%	Diskominfo	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	Diskominfo	

IV. HASIL EPPD DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil sebagai berikut:

Uraian	Skor Kinerja Tingkat	Kategori Kinerja Tingkat	Peringkat Nasional
EPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018	3,2618	Sangat Tinggi	n.a
EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019	3,3707	Tinggi	n.a
EPPD Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020	n.a	n.a	n.a
EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Tahun 2021	2,59	Rendah	130
EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022	3,2313	Sedang	75



B. Opini Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

V. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

NO. Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.139.207.910.770,00	4.017.257.994.687,82	97,05
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	786.409.061.982,00	744.514.538.980,82	94,67
4.1.01.	Pajak Daerah	326.289.274.000,00	328.734.776.136,00	100,75
4.1.02.	Retribusi Daerah	31.610.233.581,00	32.401.830.073,00	102,50
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.454.000.000,00	14.458.949.796,00	100,03
4.1.04.	Lain - Lain PAD yang Sah	414.055.554.401,00	368.918.982.975,82	89,10
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.352.798.848.788,00	3.272.743.455.707,00	97,61
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.845.097.096.669,00	2.796.514.952.898,00	98,29
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	507.701.752.119,00	476.228.502.809,00	93,80
5.	BELANJA DAERAH	4.439.165.838.204,86	4.132.750.422.628,47	93,10
5.1.	Belanja Operasi	3.283.866.866.864,86	3.039.524.743.697,47	92,56
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.741.871.180.660,86	1.609.712.189.701,00	92,41
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.998.725.004,00	1.266.210.801.307,47	92,02
5.1.05.	Belanja Hibah	141.761.002.200,00	139.814.249.339,00	98,63
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	24.235.959.000,00	23.787.503.350,00	98,15
5.2.	Belanja Modal	414.810.640.892,00	373.623.487.361,00	90,07
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.614.975.000,00	250.600.000,00	9,58
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.645.627.921,00	140.514.929.375,00	83,32
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.830.342.571,00	56.348.808.375,00	91,13
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.220.942.200,00	175.083.760.411,00	97,15
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.498.753.200,00	1.425.389.200,00	95,10
5.3.	Belanja Tidak Terduga	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	79,20
5.3.10.	Belanja Tidak Terduga	30.697.999.390,00	24.313.927.365,00	79,20
5.4.	Belanja Transfer	709.790.331.058,00	695.288.264.205,00	97,96
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	36.139.693.026,00	28.784.091.205,00	79,65
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	673.650.638.032,00	666.504.173.000,00	98,94



NO. Rek	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	%
1	2	3	4	5
SURPLUS / (DEFISIT)		-299.957.927.434,86	-115.492.427.940,65	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	100,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	344.957.927.434,86	344.957.927.434,86	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	44.999.999.663,00	100,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	4.999.999.663,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		299.957.927.434,86	299.957.927.771,86	
SILPA		0,00	184.465.499.831,21	

VI. INOVASI DAERAH

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan tahun 2023 serta efektivitas dan efisien kebijakan maka rangkaian inovasi daerah di berbagai bidang urusan pemerintahan yang diimplementasikan Kabupaten Cirebon diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Urusan Kesehatan		
a.	Dinas Kesehatan	Sistem Sigap Cepat Eman Rakyat (SICERIA)	Sistem informasi pelayanan kegawatdaruratan medis bagi masyarakat melalui emergency call dan sistem rujukan ke rumah sakit sehingga dapat dengan cepat mendapatkan penanganan medis.
		Surat Ijin Praktik (SIP) Online	Sistem informasi yang mempermudah tenaga medis mendapatkan surat ijin praktek secara online.
b.	UPTD Puskesmas Cibogo	Gerakan Baca Buku Tujuh Menit (GERBABUKATUM)	Inovasi ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil, dengan membaca dan memahami tentang informasi yang ada didalam buku KIA sebelum pemeriksaan dimulai selama 7 menit, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir dan pemantauan tumbuh kembang bayi (SDIDTK).
		Temukan dan Kawal Ibu Hamil Resiko Tinggi (MUKA BURI)	Inovasi ini merupakan salah satu kegiatan untuk menemukan ibu hamil yang beresiko secara dini dan mengawalinya agar terpantau selama kehamilannya sampai melahirkan, bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
		Serentak Jemur Ibu Hamil (SEMUR BUMIL)	Inovasi ini merupakan gerakan untuk berjemur Bersama di pagi hari dimulai kisaran waktu pukul 09.00 samapi dengan 10.00 WIB dengan durasi 15 menit di Puskesmas Cibogo.
c.	UPTD Puskesmas Gegesik	Jaring Ibu Hamil Resti agar Penanganan Maksimal (JABURE APEM)	Inovasi ini merupakan gerakan untuk memberikan penanganan maksimal ibu hamil beresiko tinggi di wilayah Puskesmas Gegesik.
		Temukan ODGJ Mengunjungi Rumah Agar Mendapatkan Terapi (TOMAT)	Inovasi ini merupakan gerakan untuk menemukan ODGJ dengan cara proaktif mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan terapi bagi warga ODGJ di wilayah Puskesmas Gegesik.



No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Keterangan
		Periksa Jantung (EKG) untuk Kesehatan (PEJANTAN)	Inovasi ini merupakan gerakan pemeriksaan jantung bagi warga yang berobat ke Puskesmas Gegecik.
d.	UPTD Puskesmas Waled	Jemput Layani Penderita TB Paru dengan Skrening Kencing Manis (JELITA TB MANIS)	Inovasi yang di khususkan untuk penemuan dan pengobatan pasien TB paru di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Waled, dimana banyaknya pasien TB di puskesmas Waled mengalami drop out obat, rendahnya kesembuhan pada pasien TB dan tidak tercapainya penemuan kasus TB BTA+.
e.	UPTD Puskesmas Gembongan	Temukan Obati Bersama Team TB (TOBAT TB)	Inovasi yang merupakan gerakan untuk menemukan penderita TB sehingga dapat dilakukan upaya pengobatan di Puskesmas Gembongan.
		Aksi Peduli Stunting (AKTING)	Inovasi yang berupa gerakan aksi peduli penanganan stunting di wilayah Puskesmas Gembongan.
f.	UPTD Puskesmas Astanalanggar	Gerakan Masyarakat Pemantau Jentik Nyamuk (GEMA PETIK)	Kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Astanalanggar berupa sosialisasi lintas program, lintas sektor, kader dan masyarakat, agar masyarakat dapat memantau keberadaan jentik nyamuknya di rumah atau lingkungan masing-masing.
g.	UPTD Puskesmas Ciperna	Bareng Kader Jaring dan Temukan TB (BAKAR JAMU TB)	Inovasi untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini bagi masyarakat yang khususnya terduga TB (suspek), dan selanjutnya dapat ditindak lanjut secepat mungkin
		Gerakan Mama Beri ASI Eksklusif (GEMA ASIEK)	Inovasi pembentukan Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI), untuk mendukung ibu berhasil menyusui yaitu memberikan ASI Eksklusif kepada bayi nya hingga berusia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun.
h.	RSUD Waled	Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkulosis Resisten Obat	Inovasi pelayanan intensif dan edukasi kepada pasien Thalassemia dan Tuberkulosis Resisten Obat di RSUD Waled, dan rujukan pelayanan Thalassemia dan Tuberkulosis Resisten Obat di Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat
i.	RSUD Arjawinangun	Sistem Rujukan & Pendaftaran (SIRUDAL) RSUD Arjawinangun	Sistem informasi rujukan dan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berobat ke RSUD Arjawinangun secara online sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan.
2.	Dinas Sosial	Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SIPEPEK)	Aplikasi "SIPEPEK ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan prima dengan berbagai kemudahan bagi masyarakat miskin atau rentan miskin untuk mendapatkan layanan rujukan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, BPJS dan bantuan sosial secara actual dan realtime.
3.	Satpol PP	Lapor Praja	Aplikasi android pelayanan pengaduan ketertiban dan ketentraman dari masyarakat ke Satpol PP Kab. Cirebon dan updating kegiatan Satpol PP secara online.
4.	Disarpus	Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)	Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) ini membantu pengelolaan kearsipan secara menyeluruh, baik penempatan klasifikasi yang tepat dan cepat, penertiban sistem penataan berkas yang baik, penelurusan data arsip yang cepat dan akurat serta dapat menuntun dalam melakukan penyusutan arsip yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD/BUMN yang ada dilingkungan kerjanya di masing-masing daerah. Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) menyajikan berbagai bentuk laporan statistik volume surat masuk dan keluar, laporan agenda surat masuk dan keluar, daftar



No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Keterangan
			arsip permanen, musnah dan dinilai kembali, daftar retensi, daftar retensi arsip dan nilai guna arsip serta berbagai bentuk laporan lainnya.
5.	Disdukcapil	Terpadu Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran Juga Akta Kematian (TAPAK JALAK)	Inovasi pelayanan 3 (tiga) administrasi kependudukan yang bisa langsung di langsung di Kecamatan yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak memperoleh surat administrasi kependudukan.
6.	Bappelitbangda	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (SILITBANG)	Aplikasi web untuk database hasil-hasil kelitbangan dari berbagai penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi di Kabupaten Cirebon.
		Rumah Aspirasi Masyarakat Kabupaten Cirebon (MAHAR MAS KATON).	Merupakan rumah aspirasi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon yang bisa memberikan masukan-masukan bagi perencanaan dan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.
		<i>Augmented Reality</i> (AR) Cakrabuwana	Aplikasi android berbasis <i>Augmented Reality</i> di Museum Cakrabuwana Kabupaten Cirebon yang berisi deskripsi dan foto berbagai benda-benda yang berada di Museum Cakrabuwana Kabupaten Cirebon dan dapat diakses masyarakat secara online sehingga meningkatkan daya tarik museum Cakrabuwana.
9.	Bapenda	Aplikasi Kanggo Sedulur Pajak (AKANG SURJA)	Aplikasi berbasis android untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan, informasi data dan pembayaran kewajiban perpajakan daerahnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon meluncurkan aplikasi Kanggo Sedulur Pajak (Akang Surja) untuk mempermudah masyarakat membayar pajak dan diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah.
10.	Disbudpar	Logo dan Tagline Pariwisata "CIREBON KATON"	Logo dan tagline untuk meningkatkan promosi bidang pariwisata yang dapat menunjukkan identitas Pariwisata dan Kebudayaan di kabupaten Cirebon.
11.	Disperdagin	E-Retribusi Pasar	Aplikasi pembayaran retribusi pasar secara online untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan upaya mewujudkan Cashless Society Dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
12.	BKAD	Transformasi Layanan Melalui Penjaminan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	Inovasi dokumen pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM) di masing-masing unit kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
		Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Cirebon (SIKATON)	Sistem informasi penatausahaan keuangan daerah sehingga mempercepat proses penyerapan anggaran belanja sebelum aplikasi SIPD yang penatausahaan berjalan dengan baik. Sistem informasi ini dapat memberikan informasi yang akurat terhadap penyajian laporan keuangan tiap bulannya
		Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIP BMD)	Sistem informasi yang menyajikan data aset Kabupaten Cirebon yang akurat dalam proses penataan Barang Milik Daerah (BMD) dan perencanaan kebutuhan BMD pada tahun berikutnya.
		Aplikasi Bayar Retribusi Daerah <i>Online</i> (BARIDIN)	Sistem informasi wajib retribusi daerah yang menginformasikan secara cepat kepada pimpinan daerah target yang akan dicapai dari pendapatan daerah yang masuk, transparan dan akuntabel untuk pengambilan kebijakan secara real time
		Sistem Informasi Rekonsiliasi <i>Online</i> SKPD (SIRAOS)	Aplikasi rekonsiliasi online pendapatan, belanja, akuntansi, persediaan dan aset perangkat daerah dalam satu aplikasi yaitu Sistem Rekonsiliasi Online untuk SKPD (SIRAOS) terintegrasi sehingga



No	Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah	Nama Inovasi Daerah	Keterangan
			mempercepat proses penyusunan laporan keuangan tiap bulannya.
13.	BKPSDM	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Sistem Informasi data-data kepegawaian seluruh ASN di Pemkab Cirebon
		Sistem E-Kinerja Pegawai (EKIN)	Sistem informasi penilaian kinerja ASN di Pemkab Cirebon
		Presensi ASN Kab. Cirebon (M-PRAS)	Aplikasi android untuk absensi online dengan verifikasi lokasi berdasarkan GPS bagi seluruh ASN di Pemkab Cirebon.
14.	Dinas Pertanian	Sistem Informasi Manajemen Pertanian (SIMTANI)	Sistem informasi pendataan data-data pertanian yang akurat dan terkini yang memuat data-data pertanian yang aktual langsung dari penyuluh pertanian yang berada di lapangan untuk mempermudah pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon.
15.	Dinas Perhubungan	Call Center Penerangan Jalan Umum (PJU)	Nomor hotline dan whatsapp call center pengaduan masyarakat untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cirebon.

VII. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan gambaran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Cirebon telah diupayakan dengan maksimal agar dapat terlaksana dengan baik. Capaian kinerja yang telah dicapai adalah merupakan hasil kerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, dan tidak dipungkiri tentunya banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga masih ada indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Berbagai upaya dan terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus Kami lakukan, kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan seluruh *stakeholders* akan mendukung pencapaian kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan selalu Kami prioritaskan guna mengakselerasi pencapaian visi dan misi serta penyelesaian agenda pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Demikian gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon sepanjang Tahun 2023 yang kami sampaikan dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai informasi kepada masyarakat. Beberapa capaian kinerja disadari masih belum sepenuhnya mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, baik pada tataran indikator makro maupun kinerja setiap urusan pemerintahan. Hal ini akan menjadi catatan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya agar fungsi dan tugas pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Cirebon, 28 Maret 2024

